



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 684 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 119 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN
TAHUNAN INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa telah dinyatakan *Corona Virus Disease 2019* sebagai *Pandemic* oleh *World Health Organization* dan dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019*;
- b. bahwa dalam rangka untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam masa penanganan *Corona Virus Disease 2019* dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Perundang-undangan
Perubahan Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5304) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 188, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6328)

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Ayatan Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan Dasar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketatanas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dasar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6079)

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 222, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4914)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Delegasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4816)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4890)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1280);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
19. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 44 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 119 Tahun 2020 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Banjarmasin Tahun 2020 dengan jadwal kegiatan pengawasan dan objek pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Maret 2020 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 14 Oktober 2020

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN,



H. HERMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 634 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 119 TAHUN 2020 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

Wilayah	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
IRBAN I	Bimtek	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Evaluasi SAKIP SKPD	Monitoring dan Evaluasi Belanja Terhadap Belanja Pematangan Lahan Parkir Kendaraan Angkutan Barang Pada Dinas Perhubungan	Pemeriksaan Reguler Dinas Perhubungan	Proby Audit Dinas PUPR	Reviu terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Percepatan Penanganan covid-19 pada Pemerintah Kota Banjarmasin	Asistensi terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Percepatan Penanganan covid-19 pada Pemerintah Kota Banjarmasin	Monitoring dan Evaluasi Progres Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020	Reviu RKA SKPD TA 2021	Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Covid 19	Reviu DAK
	Reviu DAK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Reguler Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Reviu DAK	Reguler Dinas Perpustakaan dan Arsip	Audit Kinerja Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan DPPKBPM	Reviu DAK	Verifikasi dan Validasi Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Banjarmasin Tahun 2019	Reguler Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat	Pemeriksaan Reguler Dinas Pendidikan	Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) Covid 19	Penutupan kas Akhir Tahun 2020	
		Reviu DAK	Proby Audit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Reguler Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Reviu Rancangan Akhir RKPD 2021	Reviu terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Percepatan Penanganan covid-19 pada Pemerintah Kota Banjarmasin	Reviu Renja SKPD Tahun Anggaran 2021	Reviu RKPD Perubahan SKPD TA 2020	Asistensi terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Percepatan Penanganan covid-19 pada Pemerintah Kota Banjarmasin	Reviu DAK		
			Audit Tujuan Tertentu Bidang PTK Dinas Pendidikan	Reviu terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Percepatan Penanganan covid-19 pada Pemerintah Kota Banjarmasin	Reviu terhadap Akuntabilitas Keuangan Negara untuk Percepatan Penanganan covid-19 pada Pemerintah Kota Banjarmasin	Pemeriksaan Reguler Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja	Audit Tujuan Tertentu Dinas Kepemudaan dan Olahraga					
						Pemeriksaan Reguler Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Proby Audit Dinas PUPR					

IRBAN II	Bimtek	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Reguler Kecamatan Banjarmasin Tengah	Reguler Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ATT Bidang Kesejahteraan dan Disiplin ASN BKD Diklat	Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD TA 2021	Audit Kinerja Satpol PP dan Damkar	ATT Dana Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Timur	reviu RKA SKPD 2021	ATT Dana Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Tengah	ATT Dana Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Utara	Penutupan kas Akhir Tahun 2020
		Reguler Kecamatan Banjarmasin Utara	Reguler Kecamatan Banjarmasin Barat	Audit Kepatuhan Dinas Penanaman Modal dan PTSP		Penutupan Kas Semester I Tahun 2020	ATT Dinas Perdagangan dan Perindustrian	ATT Dana Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Barat		ATT Dana Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Selatan		
			Evaluasi LAKIP SKPD	Reguler Kecamatan Banjarmasin Timur								
IRBAN III	Reviu DAK Dinas Lingkungan Hidup	Reviu Laporan Keuangan SKPD	Reviu Laporan Keuangan Pemko	Reguler Dinas Kesehatan	Reguler Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Reguler Dinas Lingkungan Hidup	Reviu SSH TH 2019	reviu Renja TA 2021	Reviu ASE/HSPK TH 2020	Reguler Sekretariat DPRD	Reviu RKA	Monitoring PBJ
	Reviu DAK Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	ATT Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik	Evaluasi SAKIP	Reguler Badan Keuangan Daerah		Reviu DAK Dinas Kesehatan	Reviu KUA PPAS TH 2021	Reguler Badan Kesbangpol	Audit Kinerja Dinas Sosial	Reguler Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Reviu atas kepatuhan Pengelolaan BMD	Penutupan kas Akhir Tahun 2020
		Reviu DAK Dinas Perumahan dan Permukiman	Probitas audit dinas perumahan dan permukiman				Reviu DAK			Reviu DAK	ATT Dinas Sosial	
		Reviu DAK Dinas Kesehatan										
IRBAN KHUSUS	PEMERIKSAAN KHUSUS											
	Bimtek	Reviu Laporan Keuangan SKPD Kota Banjarmasin TA.2019	Evaluasi LAKIP SKPD			Audit Kepatuhan Pengadaan Barang dan Jasa	Reguler Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Reguler Bagian Kesejahteraan Rakyat	Reguler Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Reviu RKA 2021		Penutupan Kas Semester Ii Tahun 2020
			Reviu LAKIP Pemko Banjarmasin				Reviu Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2021					
		Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Banjarmasin pada Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin					Reguler Bagian Organisasi					
SEKRETARIAT	Monitoring											

Plt. WALIKOTA BANJARMASIN


H. HERMANSYAH